

---

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS  
PENGGAJIAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Pricilla Roxenne Roring<sup>1</sup>, Herman Karamoy<sup>2</sup>, Sifrid Pangemanan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : pricillaroring@yahoo.com

**ABSTRACT**

*The cash expenditure accounting system is an activity that the government cannot do without, the government reinforces caution in engaging in activities related to cash receipts and cash disbursements. The problem in this research is how the application of cash accounting system of Civil Employees at the Regional Civil Service Agency of North Sulawesi Province is implemented. The objective of this research is to evaluate the application of Cash Expenditure Accounting System, especially the payroll of civil employees. The type of this research is descriptive, using the qualitative method. Where an analysis collects, organizes, and manages, in order to provide a picture of a particular situation so that it can be deduced. The results of this study indicates that the payroll cash expenditure accounting system of civil employees at the Regional Civil Service Agency of the North Sulawesi Province has been applied well in accordance with the qualitative characteristics of the financial reports as it can be proven with existing data. In conclusion regarding the Cash Expenditure Accounting System at the Regional Civil Service Agency of North Sulawesi Province is in accordance with government regulation No.13 since 2006.*

**Keywords :** Accounting system, cash expenditure, evaluation

**1. PENDAHULUAN**

Persaingan global dan era reformasi di zaman modern saat ini berdampak memicu terjadinya percepatan perubahan perbaikan kinerja dalam aparatur pemerintah. Pemerintah dituntut untuk harus bekerja menjadi lebih profesional, bersih dan beretika. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, pemerintah melakukan peningkatan anggaran gaji pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penggajian pegawai negeri sipil di daerahnya untuk mengetahui sistem penerapan pelaksanaan penggajian pegawai negeri sipil tersebut yaitu Badan Kepegawaian Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam pelaksanaan proses pembayaran gaji terdapat permasalahan yaitu masih kurang optimalnya proses pembayaran (manual) yang berimbas pada ketidaktepatan waktu pembayaran.

Pengeluaran kas merupakan suatu aktifitas dalam suatu pemerintahan yang tidak mungkin dapat dilepaskan, pemerintah haruslah berhati-hati dalam melakukan aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, artinya setiap penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan harus diperhitungkan manfaat dan keuntungan yang akan didapat. Keberadaan sistem informasi akuntansi yang benar dalam sebuah perusahaan, akan membuat manajemen dalam organisasi perusahaan tersebut dapat mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan operasi apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan (efisien dan efektif). Disamping itu sistem informasi akuntansi dapat digunakan dalam penugasan dan wewenang sebagai pedoman bagi sumber daya manusia yang bekerja dalam organisasi atau perusahaan tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai prosedur yang ada. Memperoleh

---

informasi yang sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi bisa diperoleh dengan cepat, tepat waktu, akurat, dan relevan disebabkan oleh adanya sistem informasi akuntansi.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Konsep Akuntansi Pemerintahan**

Indratno (2013:6) menyatakan bahwa akuntansi terdiri dari beberapa aktivitas antara lain mengidentifikasi, mencatat, serta mengkomunikasikan beberapa kejadian yang memiliki nilai ekonomi disebuah perusahaan sehingga menghasilkan informasi yang berguna dan diperlukan bagi pihak-pihak tertentu. Akuntansi pemerintahan adalah pengaplikasian akuntansi di bidang keuangan pemerintah yang khususnya pada tahapan pencatatan, pelaporan, dan pelaksanaan anggaran termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya pada semua tingkat atau unit pemerintahan, baik itu yang bersifat sementara atau pun permanen.

### **2.2. Konsep Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas**

Kas merupakan unsur yang paling penting dalam perusahaan. Kehidupan dan kemajuan perusahaan dapat dipisahkan dari kas. Kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, dari penerimaan kas sampai pada pengeluaran kas (Serny2013:225). Sistem akuntansi keuangan daerah menurut permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengeumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sekurangnya meliputi :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/ Barang Milik Daerah
4. Prosedu Akuntansi Selain Kas

Sistem akuntansi pengeluaran kas pemerintah daerah adalah suatu sistem yang dipergunakan untuk mencatat seluruh kegiatan transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan segala bentuk pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Sistem Akuntansi Pengeluaran kas terdiri atas 4 sub sistem yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Uang Persediaan (UP)
2. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Ganti Uang Persediaan (GU).
3. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Tambahan Uang Persediaan (TU).
4. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Langsung (LS).

### **2.3 Konsep Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai Negeri Sipil atau yang sekarang disebut aparatur sipil negara (ASN) adalah warga negara republik indonesia (RI) yang sudah memalui berbagai tahapan seleksi dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan menerima gaji/upah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah suatu lembaga/organisasi pada pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

#### **2.4 Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil**

Gaji adalah bentuk dari penghargaan atau balas jasa atas prestasi kerja seseorang yang didapatkan dan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan keluarganya secara layak, agar dapat memusatkan perhatiannya dan dapat menunjang segala kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang diemban serta dipercayakan kepadanya. Pada umumnya di Indonesia Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil menggunakan gaji pokok yang berdasarkan pada kepangkatan dan masa kerja pegawai negeri tersebut dan pangkat seseorang didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki. Dengan demikian, penentuan gaji pokok didasarkan pada teori human capital, yaitu gaji pegawai diberikan sebanding dengan tingkat pendidikan dan latihan yang dicapainya. Ada terdapat tiga sistem penggajian di Indonesia yaitu sistem penggajian skala ganda, tunggal dan campuran.

#### **2.5 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**

Sistem pengeluaran kas memiliki prosedur yang dirancang sedemikian rupa sehingga terhindar dari pencurian samahalnya dengan sistem penerimaan kas, oleh sebab itu ketika kehilangan kas ataupun pengeluaran-pengeluaran yang tidak tepat pengalokasiannya mudah diketahui. Prosedur Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas, terdiri atas:

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
6. Penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD)

(G.M Kaligis 2015)

#### **2.6 Sistem Pengendalian Intern**

Untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang disebut dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP. Menurut (Wahyu 2016) mengatakan bahwa secara umum, pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Ada 5 komponen dari sistem pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pemantauan.

#### **2.7 Standar Akuntansi Pemerintah**

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Berikut adalah proses penyusunan SAP :

- a. International Federation of Accountant
- b. Konsultasi topik kepada pengarah
- c. Pembentukan kelompok kerja
- e. Draf awal dari kelompok kerja
- f. Pembahasan draf awal oleh komite kerja
- g. Pengambilan keputusan oleh komite kerja

- h. Pelaporan kepada komite pengarah dan persiapan atas draf publikasi
  - i. Peluncuran draf publikasian
  - j. Dengar pendapat publik dan dengar pendapat terbatas
  - k. Pembahasan tanggapan dan masukan atas draf publikasian dari dengar pendapat
  - l. Permintaan pertimbangan kepada Badan Pemriksa Keuangan (BPK)
  - m. Pembahasan tanggapan BPK
  - n. Pemberlakuan standar
  - o. Sosialisasi awal standar
- SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan yaitu:
- a. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan
  - b. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran
  - c. PSAP 03 : Laporan Aliran Kas
  - d. PSAP 04 : Catatan Atas Laporan Keuangan
  - e. PSAP 05 : Akuntansi Persediaan
  - f . PSAP 06 : Akuntansi Investasi
  - g. PSAP 07 : Akuntasni Aset Tetap
  - h. PSAP 08 : Akuntasni Kontruksi dalam Pengajaran
  - i. PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
  - h. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan
  - i. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasi
- (norwedian, dkk. 2007).

## **2.9 Penelitian Terdahulu**

Virginia (2013) Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Badan Diklat Priovinsi Sulawesi Utara. Intan (2011) Pelaksanaan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Surakarta. Bertujuan menganalisis bagamanakah pelaksanaan penggajian PNS di pemerintah kota surakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya pelaksanaan penggajian PNS di pemerintah kota surakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis dan sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang berasal dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diperoleh melalui wawancara dan informasi lain yang berkaitan serta data yang didapat dari lembaga pengumpulan data dan kepustakaan terutama data kualitatif.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

- Mengajukan permohonan penelitian
- Disposisi pimpinan
- Pengumpulan data
- Analisis data penelitian dan pembahasan
- Kesimpulan dan saran

Penelitian Lapangan:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. Media Elektronik

### 3.3. Metode analisis

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Sugiyono (2011: 21) mengatakan bahwa analisis deskriptif adalah suatu rangkaian tindakan untuk menganalisis, mengumpulkan, mengelola, menyusun, dan menganalisis data angka agar supaya kita dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan sehingga dapat mengambil kesimpulan pada data tersebut.

Metode analisis ini dimulai pertama-tama dengan langkah mengumpulkan serta menyaring keterangan-keterangan yang didapat secara menyeluruh dan sedetail mungkin, selanjutnya perlu diuraikan agar supaya memperoleh suatu gambaran yang jelas. Kemudian adapun berbagai data-data yang diperoleh berupa suatu laporan keuangan yang selanjutnya dilihat dari kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-undangan, dan dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil analisis

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Prov Sulut

VISI: Terwujudnya peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan daerah melalui penataan manajemen kepegawaian yang profesional dalam rangka reformasi birokrasi.

MISI :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat, tepat akuntabel
3. Mewujudkan pencapaian karier PNS mulai CPNS sampai dengan pensiun
4. Menyediakan data dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang komprehensif dan kondusif
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta kesejahteraan PNS

Prosedur Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam prosedur pengeluaran kas terdapat beberapa proses yaitu, sebagai langkah pertama pembuatan SPD (Surat Penyediaan Dana) dibuat oleh BUD yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan dasar penerbitan SPP, kemudian berdasarkan SPD yang diterima, bendahara pengeluaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD setelah SPP dinyatakan lengkap dan disetujui maka pengguna anggaran akan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar). Penyiapan SPM dilakukan oleh PPK-SKPD dan penandatanganan dilakukan oleh pengguna anggaran dari SPM inilah kemudian di terbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dalam rangka pencairan dana yang digunakan untuk pembiayaan SKPD. BUD berhak menolak pencairan dana apabila SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan SP2D tersebut bendahara dapat mencairkan dana pada bank yang tercantum dalam SP2D sehingga dasar pencairan dana di bank oleh bendahara pengeluaran adalah SP2D. kemudian dikeluarkannya SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dan yang terakhir adalah diiterbitkannya Nota Pencairan Dana (NPD). Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup :

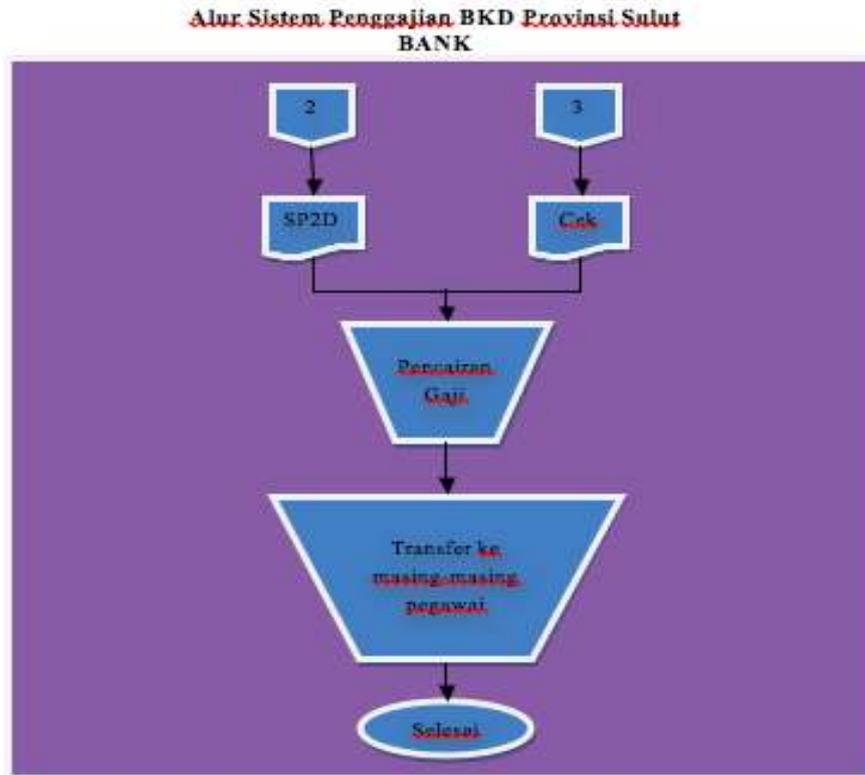
1. Buku Jurnal Pengeluaran Kas
2. Buku Besar
3. Buku Besar Pembantu

Adapun penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas penggajian PNS mengacu pada SOP (standard operasional pemerintah).

### 4.2. Pembahasan

Berdasarkan SOP mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas penggajian (SPP-SPM LS) badan kepegawaian daerah bahwa





Gambar diatas adalah alur sistem pembayaran gaji pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan juga alur tersebut diterapkan pada SKPD lain yang mengacu pada SOP (Standard Operasional Prosedur) pembayaran gaji pegawai yang berlaku saat ini. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Penggajian Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan SOP dokumen telah diterapkan dengan baik dan tertib , dan penerapannya sudah sesuai dengan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan dan dilakukan secara sistematis, dimulai dari bendahara umum kemudian akan diotorisasi oleh SKPD Pengguna Anggaran yang kemudian akan dibuatkan surat untuk melakukan pembayaran yang diotorisasi oleh PPKD melalui input ke sistem komputerisasi, bendahara akan melakukan penerimaan tunai melalui bank, kemudian dicatat pada bagian akuntansi.

Pada saat pengajuan SPP-LS dalam Sistem Akuntansi yang sesuai dengan permendagri No.13 Tahun 2016 adapun uraian yang di jelaskan Badan Kepegawaian Daerah adalah pengguna anggaran telah memberikan SPD kepada Bendahara Pengeluaran karena proses bendahara mengalami keterlambatan dalam pembuatan SPP-LS gaji untuk diberikan kepada PPK-SKPD dalam hal ini untuk pencairan dana dan karena terjadi kesalahan dalam proses penggajian diakibatkan karena adanya perubahan pangkat dan golongan sehingga terjadi kesalahan yang tidak sesuai dengan prosedur akuntansi yang ada dan untuk menyelesaikannya di butuhkan dua hari kerja tetapi memakan waktu hingga 3 sampai empat hari sehingga dalam proses pembayaran gaji kepada Pegawai Negeri Sipil mengalami keterlambatan.

---

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Penggajian Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006, karena informasi dan data yang ada dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan dapat diterima secara umum karena adanya dokumen-dokumen dan bukti transaksi seperti: Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Gaji dan Tunjangan, Surat Permintaan Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Nota Pencairan Dana (NPD).
2. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Penggajian Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan dengan SOP yang ada, telah diterapkan dengan baik dan tertib, dan sudah sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan dilakukan secara sistematis dari Bendahara Umum Daerah kemudahan mengikuti berbagai prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas penggajian yang ada hingga bisa dibayarkan kepada pegawai sesuai dengan pangkat dan golongan pegawai itu sendiri.
3. Sistem Pengeluaran Kas Penggajian Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

### 5.2. Saran

Pada saat ini di lingkungan pemerintahan sering ada opini publik yang menyatakan bahwa sering terjadi adanya penyimpangan dalam mengelola keuangan daerah sehingga orang-orang menuntut adanya transparansi keuangan daerah maka penulis menyarankan agar sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan secara efisiensi dan efektif dengan mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan dan apabila terdapat oknum tertentu yang menyalagunakan kekuasaan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan dari kesimpulan penelitian ini, penulis juga memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Lebih meningkatkan lagi kinerja setiap pegawai negeri sipil dikarenakan pegawai negeri sipil memiliki peranan penting dalam menjadikan pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat.
2. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Penggajian Pegawai Negeri Sipil harus diatur dan dirancang dengan lebih baik lagi dan lebih teliti agar masalah seperti terjadinya keterlambatan penggajian pegawai dan kesalahan dalam pencatatan akuntansi lebih berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara : [bkd.sulutprov.go.id](http://bkd.sulutprov.go.id)

Gabriella Margaretha Kligis, Ventje Ilat, Winston Pontoh: Analisis Penerapan Pengendalian Intern Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, JURNAL BERKALA ILMIAH EFISIENSI, Vol.15 No.04 Tahun 2015 Hal.284.

Indratno, Albertus. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi*. Dunia Cerdas. Yogyakarta.

Nordian, Deddi. Isyahwudi Sondi Putra. Maulidah Rahmawati (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Selemba Empat. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
Serny Tuerah, 2013, Evaluasi Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Penbelian dan  
Pengeluaran Kas pada UD. RODA MAS MANADO, JURNAL EMBA, Vol.1 No.3  
September 2013, Hal. 225-232.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahyu Maheldi., 2016, Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai  
Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, JOM FEKON, Vol.3 No.1  
Februari 2016 hal. 2528.